

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil kajian ini bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan pada pembahasan dan pengesahan anggaran untuk program listrik gratis yang tertuang didalam APBK. Padahal untuk pengawasan preventif dari DPRK dalam hal untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut dapat diminimalisir seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Selain itu, untuk pelaksanaan pengawasan represif di DPRK Aceh Jaya pada program listrik gratis belum optimal meskipun secara prosedur pelaksanaan pengawasan DPRK Aceh Jaya sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim pengawasan, turun ke lapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota DPRK aktif melakukan pengawasan. Selain itu, anggota DPRK hanya turun ke lapangan pada saat jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan. Tindak lanjut atau rekomendasi yang ditujukan kepada dinas terkait hanya sebatas rekomendasi saja. Terakhir, belum ada tim khusus yang dibentuk oleh DPRK Aceh Jaya untuk menyelidiki dan membahas permasalahan program listrik gratis secara komprehensif yang sudah berjalan dari 2014-2017.

Selain itu, fenomena politik *rent seeking* dan politik *pork barrel* terjadi dalam implementasi kebijakan program listrik gratis di Aceh Jaya. Hal ini dapat

dilihat dari latarbelakang lahirnya kebijakan listrik gratis yakni menunaikan janji politik pada kampanye pemilu legislatif 2014 kepada konstituennya. Anggota DPRK yang terpilih dan berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan eksekutif sepakat bekerjasama untuk mengimplementasikan kebijakan program listrik gratis dengan target utama adalah konstituen-konstituen (*group targeted*) yang telah memilih mereka pada pemilu legislatif. Tetapi masyarakat yang bukan konstituen mereka dan masuk dalam kategori miskin ada juga yang diberikan bantuannya.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya untuk menimalisir permasalahan yang terjadi pada program listrik gratis yakni dengan melakukan perbaikan dan perubahan pada regulasi. Untuk tahun anggaran 2018, penerima bantuan listrik gratis hanya diberikan untuk masyarakat miskin yang memiliki rekening pra bayar. Masyarakat yang memakai instalasi rekening listrik analog tidak lagi diberikan bantuannya. Selain itu, adanya pembentukan tim monitoring dan evaluasi internal dari eksekutif melalui keputusan bupati juga salah satu upaya untuk mewujudkan kebijakan program listrik gratis yang tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat miskin di Aceh Jaya.

Belum optimal pengawasan DPRK Aceh Jaya dalam kajian ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu harmonisasi hubungan eksekutif dan DPRK, tidak semua anggota DPRK Aceh Jaya bisa menjaga independensinya terhadap eksekutif. Kurangnya pemanfaatan kekuasaan formal yang diberikan kepada DPRK, rendahnya kemauan anggota DPRK untuk turun kelapangan secara langsung untuk melakukan pengecekan terhadap penerima

bantuan listrik gratis. Selain itu, lemahnya kinerja pengawasan DPRK disebabkan faktor kurangnya kapasitas teknis DPRK dan kapasitas teknis pendukung DPRK Aceh Jaya.

## **6.2 Saran-Saran**

1. Anggota DPRK Aceh Jaya harus profesional dan menjaga independensinya dengan eksekutif.
2. Anggota DPRK lebih responsif terhadap aduan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
3. Perlunya turun aktif kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Jaya.
4. Perlunya peningkatan kapasitas teknis anggota DPRK, sehingga anggota DPRK dapat menjalankan fungsinya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan rekrutmen tenaga ahli yang transparan, akuntabel dan tidak pernah terlibat di partai politik sehingga peningkatan kinerja DPRK dapat dioptimalkan.